



ANALISIS PERAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA PROSES PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2024

Desrina Waruwu ¹⁾; Helmi Dewi Sri Sari Br. Hombing ²⁾; Sanny Elysa Situmorang ³⁾ Sutri Destemi Elsi ⁴⁾

¹⁾ *desrinawaruwu08@gmail.com, Universitas Jambi*

²⁾ *helmidewidewi@gmail.com, Universitas Jambi*

³⁾ *sannysitumorang8@gmail.com, Universitas Jambi*

⁴⁾ *elsi@unja.ac.id, Universitas Jambi*

Abstract

The organization of elections in Indonesia must adapt to the rapid development of digital technology to improve effectiveness and efficiency. Digital technology-based applications help automate manual tasks such as data collection, filing, reporting and socialization, saving time, money and effort. In addition, digital technology facilitates voter training and community participation. Social media and big data also play an important role in providing information and increasing transparency and accountability of elections. Digital literacy is needed to avoid disinformation and improve political understanding. The 2024 simultaneous elections will utilize digital technology to improve the quality and participation of voters. As such, digital technology is expected to be an important innovation that creates more transparent, accountable and sustainable elections, and encourages public engagement in the democratic process. This research highlights the important role of digital technology in organizing elections, including wider access to political information and social media as an effective political communication tool. Thus, the utilization of digital technology is expected to increase voter participation and the quality of democracy in Indonesia.

Keywords: *Democracy, General Election, Digital Technology.*

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang pesat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Aplikasi berbasis teknologi digital membantu otomatisasi tugas-tugas manual seperti pendataan, pengarsipan, pelaporan, dan sosialisasi, sehingga menghemat waktu, uang, dan tenaga. Selain itu, teknologi digital memfasilitasi pelatihan pemilih dan partisipasi masyarakat. Media sosial dan big data juga berperan penting dalam menyediakan informasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemilu. Literasi digital diperlukan untuk menghindari disinformasi dan meningkatkan pemahaman politik. Pemilu serentak tahun 2024 akan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih. Dengan demikian, teknologi digital diharapkan menjadi inovasi penting yang menciptakan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian ini menyoroti peran penting teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk akses informasi politik yang lebih luas dan media sosial sebagai alat komunikasi politik yang efektif. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Demokrasi, Pemilu, Teknologi Digital*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Penerapan berbagai aplikasi berbasis teknologi digital membantu penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien. Kegiatan yang tadinya memakan sumber daya secara manual seperti pendataan, pengarsipan, pelaporan dan sosialisasi menjadi lebih otomatis dan praktis dengan bantuan teknologi digital, yang tentunya menghemat sumber daya seperti waktu, uang dan tenaga. Selain itu, teknologi digital memfasilitasi penyelenggaraan pemilu di berbagai tingkatan dengan memberikan pelatihan pemilih dan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, adaptasi teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

Di era digital, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam proses sosial jadwal dan program pemilu. Teknologi digital juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya dalam pemilu. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat mempermudah kerja penyelenggara



pemilu, namun juga diharapkan dapat menghadirkan akses masyarakat terhadap informasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari pelayanan publik yang profesional dan terpercaya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi dan memahami tahapan pemilu dengan lebih mudah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu secara signifikan. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital dalam pemilu dinilai sebagai bentuk inovasi penting untuk menciptakan proses pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi digital bermanfaat tidak hanya dalam pencarian berita dan komunikasi politik, namun juga sebagai alat efektif dalam penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Keterampilan dan pengetahuan penyelenggara pemilu dalam pemanfaatan teknologi digital diperlukan di seluruh tingkatan agar proses pemilu dapat berjalan lancar dan transparan. Dengan diperkenalkannya teknologi digital, proses pemilu dapat menjadi lebih mudah, efisien dan transparan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat menjadi inovasi penting bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan efisien.

Saat ini, penggunaan media sosial telah menjadi salah satu bentuk pola komunikasi digital yang sangat efektif, terjangkau, dan dapat melibatkan banyak orang sebagai pengguna. Media sosial memberikan peluang bagi terciptanya pola interaksi sosial dan organisasi sosial yang baru, dimana orang dapat saling berhubungan dengan mudah melalui jaringan informasi elektronik. Hal ini memungkinkan individu untuk membentuk kelompok atau komunitas dengan kepentingan dan tujuan yang sama tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Dengan menggunakan media sosial, seseorang dapat berinteraksi dengan siapa saja, baik menggunakan identitas asli maupun identitas baru tanpa adanya batasan sosial. Hal ini membuka kemungkinan bagi munculnya perasaan sejajar di antara anggota masyarakat dalam sebuah komunitas jejaring sosial.

Diperkirakan bahwa sekitar 90% dari warga negara Indonesia yang megaplikasikan internet juga mengakses media sosial. Dengan adanya media sosial, semua pihak termasuk pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu memiliki akses pada informasi atau data yang dihasilkan dari interaksi di media sosial. Ketersediaan informasi dan data yang besar dari media sosial memungkinkan terkumpulnya big data, yaitu kumpulan data yang berskala besar, kompleks, dan variatif yang memerlukan teknologi khusus untuk diproses sehingga menghasilkan data yang akurat dan relevan. Manfaat besar yang didapat dari pengelolaan big data ini sangat membantu dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu, terutama untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan tujuan agar terwujud pemilu serentak yang berkualitas.

Pemilu merupakan suatu proses politik yang dijalankan secara rutin setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur oleh Pasal 22 E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menjelaskan bahwa tujuan dari pemilu ini adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Prinsip - prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan pemilu ini meliputi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas dari proses pemilu tersebut (Fauziah et al., 2023).

Pemilu dapat menjadi gambaran dari sejauh mana kesadaran politik masyarakat tercermin dalam kompetisi, partisipasi, dan penggunaan hak politik mereka. Proses pelaksanaan pemilu merupakan cermin kesadaran masyarakat akan keberlangsungan pengelolaan negara atau pemerintahan untuk masa waktu lima tahun kedepan. Dalam hal ini pemilu merupakan sebuah arena dimana para peserta bersaing untuk mendapatkan dukungan publik, sementara masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan memberikan suara mereka. Melalui



pemilu, masyarakat juga dapat menggunakan hak politiknya untuk menentukan perwakilan yang dapat secara efektif mewakili kepentingan mereka di dalam struktur pemerintahan.

Pada tahun 2024, Indonesia mengadakan pemilu serentak untuk yang kedua kalinya. Pelaksanaan pemilihan umum serentak ini merupakan implementasi dari Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013. Dimana pelaksanaan pemilihan umum ditetapkan secara serentak dengan penggabungan pemilihan anggota legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan Presiden, yang dimulai sejak pemilu tahun 2019.

Pemilu memiliki makna yang penting bagi negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi. Keberadaannya merupakan simbol dari keberhasilan demokrasi dalam sebuah negara, dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pemilihan menunjukkan keberhasilan pemilu tersebut. Selain itu, pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin serta perwakilan rakyat yang dapat mewakili dan memperjuangkan harapan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemilu juga berfungsi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, membentuk pemerintahan yang sah, dan mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Pemilu yang dilaksanakan dengan integritas dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kredibilitas demokrasi dalam sebuah negara.

Dalam proses pelaksanaan pemilu tentunya diperlukan aksesibilitas dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Untuk itu diperlukan akses tanpa batas kepada semua segmen masyarakat berupa teknologi digital yang saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Peran teknologi dapat ditemukan di berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih, pendistribusian surat suara, hingga perhitungan dan pengumuman hasil. Sistem pemungutan suara elektronik, misalnya, memungkinkan proses voting yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Platform digital juga dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye, memfasilitasi diskusi publik, serta menyebarkan informasi resmi tentang pemilu. Selain itu, teknologi analitik data berperan dalam memetakan preferensi pemilih dan mengoptimalkan strategi kampanye. Dengan demikian, integrasi teknologi digital dalam pemilu dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Literasi digital menjadi salah satu tugas yang sangat mendesak saat ini, apalagi menjelang pemilu tahun 2024. Masyarakat kita khususnya generasi muda membutuhkan perhatian, bimbingan dan bantuan dari orang tua, pendidik dan pemerintah karena sangat penting. kecenderungan menerima konten atau informasi negatif, terutama dari media sosial, yang mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, literasi digital semakin dibutuhkan sebagai salah satu program penting untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada pengguna internet, khususnya pengguna media sosial. Komunikasi di era ini memerlukan pemahaman mengenai literasi digital yang sama pentingnya dengan pemahaman terhadap informasi lainnya. Generasi milenial yang tumbuh dengan akses teknologi yang tidak terbatas memiliki pola pikir yang tidak sama dengan generasi sebelumnya. Setiap orang harus bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi untuk berkomunikasi atau berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat 4 komponen yang membentuk pendekatan dengan basis keterampilan dalam literasi media menurut; yang pertama adalah akses, merupakan proses dinamis dan sosial, tindakan yang terus menerus sehingga dapat dilihat kualitas berkelanjutan dari layanan penyediaan akses dan konten media. Dengan adanya media baru, penyediaan akses di bidang pendidikan, partisipasi dan juga budaya dibutuhkan untuk lebih terhubung dengan konteks sosial masyarakat (Lievrouw et al., 2014). Kedua, analisis menjelaskan hubungan yang berkelanjutan dan memuaskan dengan teks-teks simbolik terdapat pada kompetensi analitis, dimana pengguna harus kompeten dan memiliki motivasi akan tradisi dan nilai-nilai budaya



yang relevan. Sejalan dengan itu skema analisis mulai dari agensi media, kategori media, teknologi media, bahasa media, khalayak media dan representasi media. Enam tahapan skema ini merupakan tahapan analisis awal yang efektif digunakan untuk media baru. Pendekatan ketiga yaitu evaluasi, merupakan kemampuan dalam mengevaluasi konten memerlukan keterampilan yang mumpuni karena melibatkan evaluasi kritis mengenai pengetahuan umum dan juga konteks politik, ekonomi, sosial juga budaya dari konten yang didapatkan. Pendekatan keempat adalah konten, merupakan materi hasil produksi berdasarkan pengalaman pembuatnya. Pembuatan konten yang profesional menyampaikan ide, gagasan, aspirasi dan kreatifitas sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi budaya di masyarakat.

Peserta pemilu maupun partai politik hendaknya tidak hanya berkompetisi untuk merebut perhatian dan suara, namun peserta pemilu juga harus memberikan literasi politik digital yang baik dan sehat. Dalam kontestasi-kontestasi politik sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana politik elektoral telah menjadi arena ketika kebenaran dan kebohongan berkelindan, sehingga melahirkan kebingungan, konflik sosial, dan polarisasi di masyarakat. Pemilu di pelbagai negara di dunia termasuk Indonesia telah menjadi arena politik post truth, karena batas antara kebenaran dan kebohongan menjadi kabur (Noak, 2022).

Terdapat beberapa manfaat teknologi digital dalam pelaksanaan pemilu. Studi terdahulu yang dilakukan oleh (Fauziah, et.al, 2024) menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi digital, khususnya media sosial, menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 untuk memperlancar proses pemilihan serta sebagai media komunikasi dan informasi kepada masyarakat atau pemilih. Teknologi dalam hal ini merujuk pada penerapan ilmu dan teknologi pada tahapan pemilu, sementara digitalisasi pemilu mencakup penggunaan aplikasi dalam proses tahapan pemilu. Tujuan utama pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu adalah untuk mengatasi berbagai masalah, seperti efisiensi penggunaan anggaran dan pengurangan keterlibatan tenaga manusia.

Peneliti terdahulu lainnya yaitu (Yunas et al., 2023) menjelaskan, di tengah arus teknologi dan informasi yang semakin dinamis, media sosial pun digunakan sebagai salah satu instrumen politik kandidat maupun partai politik yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum tahun 2024. Keberadaan media sosial tentunya berjalan beriringan dengan demografi politik Indonesia saat ini, dimana hampir 40-60% pemilih didominasi oleh generasi muda yang sangat aktif dan dekat dengan penggunaan media sosial. Sehingga tak heran, di media sosial seringkali muncul disinformasi, hoax dan lain-lain.

Penelitian terdahulu ketiga (Nurhaipah & Ramallah, 2024) menjelaskan, dalam rangka menciptakan iklim dan suhu politik yang damai, media sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi sekaligus rujukan baik data dan informasi yang akurat dan benar. Dalam konteks kehidupan demokrasi, media memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim politik yang damai dan sehat. Sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi, media memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada publik. Media juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan memantau keramaian jelang pesta politik 2024. Dengan memberikan laporan dan berita yang independen dan obyektif, media dapat membantu publik untuk memahami informasi politik yang ada saat ini. Keadaan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial bagi media sendiri. Namun bagi publik juga harus ikut memantau dan berperan aktif terutamanya perihal penyebaran informasi hoaks. Kemampuan literasi memiliki peran penting dalam menambah rujukan informasi politik yang akurat. Di era digital saat ini, informasi politik dapat dengan mudah ditemukan melalui berbagai platform media sosial dan situs web. Namun, tidak semua informasi yang tersedia adalah benar dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, literasi sangat diperlukan untuk dapat membedakan antara informasi yang akurat dan yang tidak.



Berdasarkan analisis tersebut, maka penelitian ini akan memfokuskan pada peran teknologi digital dalam proses pelaksanaan pemilu 2024, dimana media digital menjadi sebuah sarana atau media yang begitu penting bagi para kandidat dalam mempengaruhi dan juga berinteraksi dengan para pemilih. Serta media digital memegang peran yang signifikan dalam pembentukan proses demokrasi dan pengambilan keputusan politik selama proses berlangsungnya pemilu 2024. Dari penelitian ini, diharap: 1) Dapat memberikan wawasan tentang bagaimana peran teknologi digital pada pelaksanaan pemilu 2024; 2) Dapat menjadi sumber referensi dan bahan bacaan bagi para pihak yang ingin mempelajari tentang pemanfaatan media digital dalam pemilu; 3) Dapat memberikan masukan dan rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih melalui media digital; 4) Dapat meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA

Demokrasi

Menurut Elliott (1994), demokrasi adalah sistem institusional untuk mencapai keputusan-keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan melalui perjuangan kompetitif untuk mendapatkan suara rakyat. Definisi ini menekankan adanya kompetisi antara individu atau partai politik untuk mendapatkan dukungan suara dari rakyat.

Definisi Schumpeter menekankan bahwa demokrasi bukan hanya sekadar pemerintahan mayoritas, melainkan harus ada kompetisi politik yang fair dan terbuka di antara para pesaing untuk meraih dukungan rakyat, yang menjadi kunci dari sebuah sistem demokrasi yang efektif.

Teknologi Digital

Teknologi digital dapat didefinisikan sebagai seperangkat alat, sistem, dan aplikasi yang memanfaatkan komputer, jaringan, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi secara digital. Hal ini menekankan karakteristik interaktivitas, konektivitas, dan kemampuan pemrosesan data digital yang besar sebagai ciri khas teknologi digital (Elgar, 2004).

Selanjutnya, Tapscott (2015) mendefinisikan teknologi digital sebagai alat dan infrastruktur yang memungkinkan konversi data analog menjadi format digital yang dapat dimanipulasi, dikirimkan, dan diakses dengan cepat dan efisien. Tapscott menekankan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan sebagai keunggulan teknologi digital.

Sementara itu, menurut (Negroponte, 1995) teknologi digital adalah teknologi yang memungkinkan informasi disimpan, diproses, dan dikirimkan dalam bentuk bit-bit digital. Negroponte menekankan aspek digitalisasi sebagai esensi dari teknologi digital.

Definisi-definisi tersebut menggambarkan bagaimana para ahli memandang teknologi digital sebagai seperangkat alat berbasis komputer dan jaringan yang memungkinkan transformasi informasi menjadi format digital yang dapat dimanfaatkan secara efisien dan fleksibel.

Manfaat Teknologi Digital

Teknologi digital memiliki beberapa manfaat penting, di antaranya: 1) Efisiensi dan produktivitas: Teknologi digital memungkinkan otomatisasi, pengumpulan, dan pemrosesan data secara cepat serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. 2) Peningkatan akses dan keterlibatan: Teknologi digital memungkinkan informasi dan layanan pemilu dapat diakses secara luas dan mudah oleh masyarakat. Hal ini dapat mendorong peningkatan partisipasi dan keterlibatan pemilih dalam proses demokrasi. 3) Transparansi dan akuntabilitas: Teknologi digital memungkinkan data dan proses pemilu dapat direkam, dilacak, dan dibagikan secara terbuka. Ini dapat meningkatkan



transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. 4) Inovasi dan fleksibilitas: Teknologi digital memungkinkan adanya inovasi dalam metode dan saluran pemilu, seperti e-voting, media sosial dalam kampanye, dan lain-lain. Fleksibilitas ini dapat membuat proses pemilu lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. 5) Peningkatan jangkauan dan efektivitas: Teknologi digital memungkinkan informasi dan kampanye pemilu dapat menjangkau pemilih yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan mobilisasi pemilih (Negroponte, 1995).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*literature study*). Studi literatur pada penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara obyektif, sistematis, analitis, dan kritis tentang peran Instagram sebagai sosial media yang menyebarluaskan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian dengan studi literatur ini memiliki persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel hasil penelitian tentang variabel dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan data sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, artikel, situs internet, dan lainnya yang relevan dengan model pembelajaran thepower of twodan kemampuan berpikir kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa manfaat teknologi digital dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Beberapa manfaat atau peran tersebut adalah:

Teknologi Digital sebagai Wadah Informasi yang Akurat

Teknologi digital telah menjadi kekuatan yang mengubah dunia informasi dan komunikasi. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi informasi secara efisien dan cepat, karena mampu mengubah informasi menjadi digital. Salah satu keunggulan terpenting teknologi digital adalah kemampuannya menjaga integritas dan akurasi data. Dengan menggunakan protokol dan format digital standar, informasi dapat direproduksi dan didistribusikan tanpa kehilangan kualitas atau keakuratan.

Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan murah. Melalui platform digital seperti internet, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara instan dari berbagai sumber. Hal ini meningkatkan transparansi dan arus informasi yang lebih terbuka, sehingga memungkinkan dilakukannya pemeriksaan silang dan verifikasi keakuratan informasi. Teknologi digital juga memfasilitasi pembaruan dan koreksi informasi secara berkala, memastikan bahwa pengguna mendapatkan informasi terkini dan paling dapat diandalkan.

Teknologi digital telah menjadi wadah informasi yang sangat penting dalam proses pemilihan umum (pemilu) modern. Melalui platform digital, informasi terkait proses pemungutan suara, perhitungan hasil, dan transparansi proses demokrasi dapat disajikan secara cepat, akurat, dan terjangkau oleh masyarakat. Misalnya, website resmi penyelenggara pemilu dapat menyediakan data statistik pemilih, informasi lokasi TPS, serta hasil penghitungan suara secara real-time. Aplikasi berbasis seluler juga memungkinkan pemantauan proses pemilu dan verifikasi hasil secara langsung oleh pemilih. Selain itu, teknologi digital memfasilitasi kampanye dan debat publik secara virtual, memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk memantau dan terlibat dalam pesta demokrasi. Dengan demikian, teknologi digital berperan



penting dalam mewujudkan pemilu yang transparan, akuntabel, dan mencerminkan kehendak rakyat secara akurat.

Dalam pemilu 2024, teknologi digital telah menunjukkan perannya yang vital dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan umum. Berbagai platform digital, seperti website resmi penyelenggara, aplikasi berbasis seluler, dan media sosial, telah menjadi saluran komunikasi dan informasi yang efektif bagi pemilih. Melalui teknologi ini, pemilih dapat mengakses data pemilih, informasi lokasi TPS, hasil hitung cepat, hingga pemantauan proses pemungutan dan penghitungan suara secara real-time. Selain itu, teknologi digital juga memfasilitasi kampanye dan debat publik secara virtual, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat (Amir, 2020). Meskipun terdapat potensi risiko penyebaran informasi yang tidak valid, pengembangan literasi digital di kalangan masyarakat telah membantu memastikan pemilih dapat menilai kredibilitas sumber informasi dan memahami konteks yang mendasari data yang disajikan. Dengan demikian, teknologi digital telah menjadi elemen kunci dalam mewujudkan pemilu 2024 yang transparan, akuntabel, dan mencerminkan kehendak rakyat secara akurat (Anisa Dwi Asmaranti et al., 2024).

Teknologi Digital sebagai Akses Informasi Politik

Di era digital saat ini, informasi politik tersedia melalui berbagai platform media seperti situs berita, media sosial, dan aplikasi seluler. Meskipun informasi politik meningkat, penting untuk diingat bahwa tidak semua informasi politik di media benar atau akurat. Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi sumber dan keakuratan informasi politik sebelum menyebarkannya kepada publik. Selain itu, media juga harus memastikan bahwa informasi politik yang disampaikan kepada masyarakat tidak berpihak pada pihak atau partai politik tertentu dan tidak terjerumus ke dalam perangkap bias politik atau komersial.

Seseorang yang memiliki kemampuan membaca yang baik dapat membantu memperbanyak referensi informasi politik yang benar bagi dirinya dan masyarakat umum. Sebagai konsumen informasi, literasi dapat membantu kita memeriksa keakuratan berita dan menghindari propaganda politik atau penipuan. Banyak saluran media mengatur informasi menggunakan model algoritma ABC.

Studi terdahulu dan studi yang penulis lakukan sama-sama menekankan pentingnya teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, namun dengan fokus dan penekanan yang sedikit berbeda.

Fauziah, et.al., (2024) menekankan pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemilihan, termasuk penggunaan aplikasi digital untuk penghematan anggaran dan pengurangan keterlibatan tenaga manusia. Teori yang digunakan di sini adalah teori inovasi teknologi, yang mengacu pada bagaimana teknologi baru diadopsi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengatasi berbagai kendala dalam proses pemilu. Pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi dan informasi juga dijelaskan sebagai bagian dari proses ini.

Yunas et.al., (2023) berfokus pada penggunaan media sosial sebagai alat politik oleh kandidat dan partai politik, terutama dengan demografi pemilih yang didominasi oleh generasi muda. Mereka menyoroti tantangan disinformasi dan hoaks di media sosial, mengacu pada teori komunikasi politik digital. Teori ini menjelaskan bagaimana media sosial digunakan sebagai platform untuk kampanye politik dan komunikasi antara kandidat dan pemilih, serta dampaknya terhadap perilaku pemilih dan opini publik.

Titih Nurhaipah dan Zaqia Ramallah (2024) menekankan peran media dalam menciptakan iklim politik yang sehat dan damai, serta pentingnya literasi digital untuk membedakan informasi yang akurat dari yang tidak. Penelitian ini didasarkan pada teori media dan demokrasi, yang menyoroti peran media sebagai pilar demokrasi dalam menyediakan informasi yang akurat dan membantu publik memahami informasi politik. Teori ini juga



mencakup tanggung jawab sosial media dalam memantau dan melaporkan proses pemilu secara objektif.

Studi yang penulis lakukan menyatukan berbagai elemen dari ketiga studi terdahulu ini dengan menekankan pentingnya adaptasi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemilu. Peneliti membahas otomatisasi tugas-tugas manual, pelatihan pemilih, partisipasi masyarakat, dan penggunaan media sosial serta big data untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, menyoroti kebutuhan literasi digital untuk menghindari disinformasi, sejalan dengan penekanan pada teori inovasi teknologi dan komunikasi politik digital. Studi ini juga menggabungkan aspek-aspek dari teori media dan demokrasi, menekankan pentingnya akses informasi politik yang lebih luas dan penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik yang efektif. Dengan demikian, teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi di Indonesia, menciptakan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu 2024, teknologi digital jelas memainkan peran penting sebagai wadah informasi yang akurat sekaligus sebagai tempat untuk mengakses informasi politik, khususnya tentang pemilu 2024. Meskipun tantangan seperti disinformasi digital masih ada, perkembangan kompetensi digital di kalangan masyarakat telah memungkinkan mereka untuk menilai kredibilitas sumber informasi dengan lebih cermat. Secara keseluruhan, teknologi digital telah menjadi tulang punggung bagi penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kehendak rakyat.

Saran

Dalam hal ini diharapkan kedepannya teknologi digital tidak hanya dipandang sebagai platform berbasis hiburan melainkan sumber informasi untuk berbagai aspek kehidupan khususnya sosial politik. Pemanfaatan teknologi digital yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat dan positif pula bagi kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>
- Anisa Dwi Asmaranti, Rizky Dwi Sulisty Rahayu, & Revienda Anita Fitri. (2024). Analisis Daya Pikir Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Guna Menangkal Berita Hoax Mengenai Pemilihan Umum 2024. *Journal Sains Student Research*, 2(2), 87–96. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i2.1175>
- Elgar, E. (2004). Informationalism, Networks, and the Network Society: a Theoretical Blueprint. *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, 1–73.
- Elliott, J. E. (1994). Joseph A. Schumpeter and the theory of democracy. *Review of Social Economy*, 52(4), 280–300. <https://doi.org/10.1080/758523325>
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>
- Lievrouw, L. A., Angeles, L., & Livingstone, S. (2014). Leah A . Lievrouw and Sonia Livingstone Introduction to the updated student edition Book section. January 2006.
- Negroponte, N. (1995). *Being Digital*. Knopf Doubleday Publishing Group. <https://books.google.co.id/books?id=LcvR9WHvXmAC>



- Noak, P. A. (2022). Digitalisasi Birokrasi Dalam Wilayah Publik Dan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 4(2), 132. <https://doi.org/10.24843/jiwsp.2022.v04.i02.p05>
- Nurhaipah, T., & Ramallah, Z. (2024). Literasi Media Dalam Menangkal Informasi Hoaks Jelang Kontestasi Politik 2024. *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.25124/ijdpr.v2i2.6834>
- Yunas, N. S., Said, M. F., & SR, A. A. (2023). Penguatan Literasi Digital Pada Generasi Millenial Dalam Menyongsong Pemilihan Umum 2024. *Surya Abdimas*, 7(4), 715–726. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i4.3432>